

**IMPLEMENTASI PROGRAM GERDU TASKIN
TERHADAP PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
JAWA TIMUR
(Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro dan Tuban)**

Herry Yulistiyono

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan – Fakultas Ekonomi UTM
herry_utm@yahoo.co.id

Abstract

Gerdu-Taskin program in East Java is more geared to the pattern of development and program management more integrated and sustainable. The government's efforts through the Dinas Koperasi dan UMKM in East Java province in the empowerment of the poor began in 2002 until 2009.. In 2010 and 2011 the program continued with the name Movement Welfare Society Program (Gema Sejahtera). The activities carried out by providing funds for lending and borrowing taskin group incorporated in microfinance institutions (MFIs). Role of Microfinance Institutions (MFIs) in supporting SME activities interesting to study because the development of MFIs turned out in line with the development of SMEs. The purpose of this study is the evaluation of the performance of the Empowerment Program Gerdu Taskin is intended MFI to obtain information on the results of the impact of the poverty reduction program through the development of enterprises with the capital loan. Grants received by MFIs in Tuban has been used by the Micro, Small and guided them, in which 40% said their business progress after receiving funds Gerdu taskin of East Java province, while in Bojonegoro only 31.67% said no progress. This is quite reasonable given the characteristics and socio-economic circumstances in each different region. The main obstacle in the development aid Gerdu Taskin / Gema Sejahtera is a matter of human resources, venture capital is given, and the public perception of the program funding Gerdu Taskin / Gema Sejahtera. To develop MFIs in supporting the SME target is to improve the effectiveness of aid delivery program Gerdu Taskin/ Gema Sejahtera and prevent congestion at the level of beneficiaries of the revolving fund of funds. Another thing that must continue to be encouraged that increase the independence of the MFI beneficiaries through guidance and counseling as well as the development and enhancement of partnerships in business activities MFI beneficiaries in an effort to add value-added production.

keyword: Gema Sejahtera; Micro Finance Institution; the effectiveness of aid delivery

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Propinsi Jawa Timur menempatkan

program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan Jawa Timur sebagaimana termuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2008. Arah kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Prioritas program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRIDAYA meliputi:

- 1) pemberdayaan manusia
- 2) pemberdayaan usaha
- 3) pemberdayaan lingkungan.

Program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Gerdu-Taskin juga telah terbukti mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa:

- 1) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan
- 2) menggerakkan usaha sektor riil di pedesaan
- 3) mengurangi praktik rentenir di pedesaan melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah

- 4) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pedesaan
- 5) terjadinya proses pembelajaran sosial (social learning)
- 6) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan (www.bapemaskb.surabaya.go.id).

Program Gerdu Taskin juga ikut memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Pada 2005 terdapat 22,51% penduduk miskin di Jawa Timur, menurun menjadi 19,89% pada 2006. Pada 2007, menjadi 18,89%, dan pada 2008 kembali menurun menjadi 16,97%. Persentase ini menurun 1,92% dibanding 2007 (18,89%). Padahal pada Maret 2008, jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 18,51% (6,65 juta). Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 239 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 265,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2008, sebagian besar (65,26%) penduduk miskin berada di pedesaan (LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2011)

Upaya pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat miskin dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009.

Tahun 2010 dan 2011 program tersebut dilanjutkan dengan nama Program Gerakan Masyarakat Sejahtera (GEMA SEJAHTERA). Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan dana untuk usaha simpan pinjam kelompok taskin sebesar Rp. 10 juta per kelompok (tahun 2002), Rp. 7,5 juta (2003), Rp. 10 juta (2005 s.d 2008) dan Rp. 15 juta (2009 s.d 2011). Sampai dengan tahun 2011 telah memberikan bantuan 302 kelompok dengan total nilai bantuan sejumlah Rp.3.755.000.000,- (Dinas Koperasi Jawa Timur).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui Gerdu Taskin dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.

Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal. Namun, hal ini menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan

UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berusaha mengkaji implementasi Program Gerdu Taskin / Gema Sejahtera Terhadap Pemberdayaan LKM di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan evaluasi kinerja Program/Kegiatan Strategis Gerdu Taskin terhadap Pemberdayaan LKM dimaksudkan untuk memperoleh informasi hasil (*outcome*) program/kegiatan Gerdu Taskin/Gema Sejahtera yang dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011, mengenai dampak program pengurangan kemiskinan melalui pengembangan usaha dari adanya pinjaman modal dari Kelompok Program Gerdu Taskin/Gema Sejahtera.

Manfaat Penelitian

1. Pemerintah akan semakin mendorong kebijakan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UKM melalui program Gerdu Taskin.
2. Rujukan bagi instansi yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui program Gerdu Taskin sehingga tercipta kolaborasi serta sinergi yang positif dalam usaha pengentasan kemiskinan..

3. Sumber informasi tentang program Gerdu taskin terhadap pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Program Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan)

Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi pemerintah Indonesiamerencanakan berbagai program, antara lain Program “*Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan*” Gerdu Taskin/Gema Sejahtera yang sekaligus dipadukan dengan program pengentasan kemiskinan atau “*poverty elevation*”. Gerdu Taskin merupakan program pengentasan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya dan organisasikemasyarakatan (LSOM), masyarakat luas dan keluarga miskin itu sendiri.

Keunggulan program Gerdu Taskin ini adalah “*keterpaduan tujuan dan sasaran*” untuk menanggulangi sebab-sebab terjadinya kemiskinan, sehingga kondisikesejahteraan penduduk target program yang lebih baik

dapat dicapai. Prinsip dasar yang di terapkan dalam Gerdu Taskin secara nasional, meliputi :

- 1) Memperlakukan keluarga miskin sebagai subyek, dengan melibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.
- 2) Dukungan yang diberikan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat dan keluarga miskin, mencegah timbulnya kemiskinan, dan melindungi keluarga miskin sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki keluarga sasaran, serta memberikan peluang yang ada di lingkungannya.
- 3) Dukungan yang diberikan secara menyeluruh dalam bentuk kebijaksanaan, peraturan, program yang membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, menumbuhkan wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku ekonomi yang produktif, serta memberikan kemampuan dan akses yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahterannya.
- 4) Pengembangan potensi keluarga miskin dilakukan melalui pendekatan kelompok disertai pendamping mandiri yang berasal dari instansi pemerintah, kalangan swasta, LSOM, dan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Program Gerdu Taskin

Tujuan umum Program Gerdu Taskin adalah untuk membantumasyarakat dan keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan, serta memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencegah terjadinya kemiskinan baru serta dapat lebih berperan dalam pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1) Membantu keluarga miskin memperoleh kebutuhan pokok dengan cara yang terjangkau.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga sasaran, khususnya dalam bidang ekonomi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan secara mandiri.
- 3) Mengembangkan kemampuan keluarga sasaran agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 4) Meningkatkan akses keluarga miskin untuk mendapatkan modal, teknologi, usaha yang tetap, akses memperoleh fasilitas dan pelayanan masyarakat lainnya.
- 5) Menumbuhkan dinamika sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan secara gotong royong oleh masyarakat.
- 6) Memperkuat kondisi dan keterpaduan di antara unsur-unsur yang terkait, yaitu

pemerintah, swasta, LSOM, dan masyarakat, dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Adapun sasaran dari pelaksanaan program Gerdu Taskin adalah "*keluarga miskin*", yang terdiri dari kategori "*keluarga Pra sejahtera*" dan "*Sejahtera I*" karena alasan ekonomi. Prioritas dari pelaksanaan program Gerdu Taskin mencakup sedikitnya beberapa aspek pengentasan kemiskinan, melalui upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Beberapa aspek diantaranya adalah :

a) Pengembangan kegiatan ekonomi keluarga

Kegiatan-kegiatan ekonomi dalam keluarga yang semula hanya bersifat untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dapat ditingkatkan menjadi kegiatan yang lebih bersifat "*ekonomis*" dan berorientasi pada kebutuhan pasar seperti ini dapat dilakukan di bidang pertanian, kerajinan, industri perdagangan dan jasa, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan peluang yang ada. Dukungan dalam bentuk pemberian *pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan manajemen* untuk memperoleh "*nilai tambah*" dari usaha yang selama ini dilakukan.

b) Peningkatan peluang usaha dan peningkatan pendapatan

Bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan

memberikan bantuan penguatan ekonomi yang lebih besar kepada kelompok-kelompok usaha tersebut. Secara bertahap dukungan ini diarahkan menjadi bentuk koperasi, dan mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan antara keluarga yang belum mampu dengan keluarga lain yang telah mampu.

c) Peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat

Dukungan yang diberikan dapat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pertemuan, koordinasi, pemberian peran untuk menangani masalah-masalah khusus.

Pemberdayaan LKM melalui Program Gerdu Taskin

Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah melakukan pengembangan lembaga keuangan mikro yang berada di tingkat desa/kelurahan. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) yang dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan Tahun 2008 telah menjangkau 1.958 Desa/Kelurahan di Jawa Timur serta telah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mudah, murah dan cepat berupa 1.958 Unit Pengelola

Keuangan (UPK). Berdasarkan hasil pemetaan menunjukkan jika kinerja UPK yang dinilai dari tingkat kesehatannya mengalami fluktuasi. Kinerja UPK masih belum optimal dalam hal peningkatan tingkat kesehatannya dan peranannya untuk menggerakkan usaha ekonomi produktif di masyarakat (www.elib.pdii.lipi.go.id).

Peran Lembaga Keuangan Mikro

Hasil penelitian Bank Indonesia sampai dengan Desember 2010 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menunjukkan bahwa baru 10 lembaga keuangan bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta 6 lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan terhadap UMKM. Padahal, UMKM merupakan potensi kredit dimana usaha mikro mencapai sekitar 52 juta unit, usaha kecil sekitar 500 ribu unit, dan usaha menengah sekitar 40 ribu unit.

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang dianggap mampu mencukupi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap unbankable. Dari segi pembiayaan, LKM mampu memberikan kredit tanpa jaminan dan menjadi lembaga perpanjangan tangan lembaga

keuangan formal (www.lppi.or.id).

Beberapa keunggulan LKM sangat penting dalam pengembangan usaha kecil diantaranya adalah :

- 1) Tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani usaha mikro dan kecil (UKM);
- 2) Diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM);
- 3) Mandiri dan mengakar di masyarakat;
- 4) Jumlah cukup banyak dan penyebarannya meluas;
- 5) Berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau (melayani) anggota dan masyarakat;
- 6) Memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi anggotanya (tanpa agunan);
- 7) Membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin;
- 8) Mengurangi berkembangnya pelepas uang (*money lenders*);
- 9) Membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat dan ;
- 10) LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai alat / metode dalam menyusun gagasan dan analisis terhadap permasalahan

yang dihadapi dalam penelitian ini.

1. Pendekatan yang dikenakan tema penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai menggunakan metode campuran yaitu pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik pengumpulan data maupun analisis dilakukan secara terpadu dengan pendekatan:
 - 1) Kuantitatif (khususnya melalui survei terbatas dan pengolahan data-datasekunder yang sudah tersedia);
 - 2) Kualitatif (melalui wawancara mendalam terhadap para informan kunci dan pemangku kepentingan terkait, biasanya dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang cukup luwes untuk menstimulir diskusi, observasi dan jugamelalui wawancara dengan kelompok masyarakat); Partisipatoris (melaluidiskusi kelompok terarah, dengan beberapa alat bantu dan pertanyaan-pertanyaankunci, yang diarahkan untuk identifikasi persoalan sekaligus mencari alternatif solusi).

2. Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari responden.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen pelaksanaan program Gerdu Taskin/Gema Sejahtera.

3. Populasi dan Sampel

Suharsimi Arikunto (1998) mengemukakan bahwa "Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian" Pengertian tentang populasi merupakan keseluruhan obyek atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah LKM penerima bantuan program Gerdu Taskin/Gema Sejahtera. Metode Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu dalam pemilihannya. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah metode deskriptif yang berkaitan dengan data kuantitatif dan metode analitis yang berkaitan dengan data

kualitatif. Analisa kualitatif lain yang digunakan adalah analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT). Analisis SWOT inididak menggunakan bobot nilai tertentu karena jenis data yang dianalisis bervariasi, tetapi menggunakan penilaian secara generalisasi sehingga evaluasinya lebih bersifat kualitatif dengan mendasarkan pada kenyataan empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kemiskinan dan Upaya Penanggulannya di Jawa Timur

Kemiskinan harus dipahami sebagai bersifat multidimensional, yang tak hanya diukur dari penghasilan, tapi juga mencakup hal lebih luas, yakni kerentanan orang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi miskin; dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Penanggulangan kemiskinan yang tidak memberdayakan penduduk miskin membuat mereka semakin terpuruk dalam kebudayaan kemiskinan.

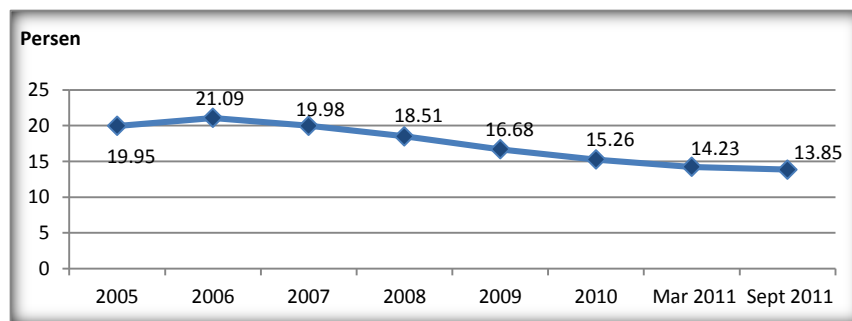
Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial

rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat *rescue* (penyelamatan)- yakni upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM - sampai dengan upaya *recovery* (pemulihan) - yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan juga Program GerduTaskin yang bertujuan mengentas penduduk miskin melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan Tridaya (pemberdayaan manusia, usaha dan

lingkungan), yang pada 2007 dikembangkan menjadi Jaringan Pengaman Ekonomi Sosial (Japes).

Perkembangan pembangunan suatu daerah dapat dipantau dari indikator makro pembangunan diantaranya kemiskinan. Selama periode Maret-September 2011 persentase penduduk miskin di Jawa Timur turun 0,38 poin persen atau menjadi 13,85% di bulan September 2011. Angka kemiskinan sebesar 13,85% ini besarnya diatas target kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (15,0-15,5 persen). Penduduk miskin selama periode Maret-September 2011 turun sebanyak 128,9 ribu penduduk atau menjadi 5.227,31 ribu penduduk di bulan September 2011.

Gambar1.Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2005 – 2011 (Triwulan 3)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2005-2011

Penduduk miskin sebanyak 66,82% tinggal di daerah pedesaan atau sebanyak 3,493ribu jiwa. Angka tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk secara agregat pada masing-

masing wilayah yaitu pedesaan dan perkotaan menunjukkan persentase penduduk miskin untuk daerah pedesaan sebesar 17,55% dan 9,66% untuk daerah perkotaan. Angka persentase penduduk miskin

tersebut mengalami pengurangan selama 1 semester ini yaitu sebesar 0,21 poin persen untuk daerah perkotaan dan 0,53 poin persen untuk daerah perdesaan. Hal lain menunjukkan persentase pengurangan penduduk miskin di daerah perdesaan 2,5 kali lebih cepat daripada di perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 4,5 tahun ini. Maret 2011, angka P1 sebesar 2,27 turun menjadi 2,00 pada September 2011. Pada waktu yang sama, angka P2 sebesar 0,54 turun menjadi 0,46 (Tabel 1). Kedua nilai indeks yang semakin menurun berindikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Pada tabel 1 terlihat, nilai P1 dan P2 untuk dari perdesaan

nilainya 2 kali lebih tinggi dari daerah perkotaan pada September 2011. Nilai P1 untuk perkotaan sebesar 1,25 dan perdesaan sebesar 2,67. Besaran nilai menunjukkan nilai P1 perdesaan 2,14 kali nilai P1 perkotaan. Pada waktu yang bersamaan nilai P2 untuk daerah perdesaan 2,25 kali nilai P2 daerah perkotaan. Kedua angka tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada daerah perkotaan. Pada saat yang sama, upaya percepatan penurunan kualitas kemiskinan di daerah perdesaan lebih cepat dari pada daerah perkotaan. Hal ini ditandai dengan penurunan nilai P1 dan P2 yang lebih tinggi pada daerah perdesaan daripada perkotaan. Penurunan tersebut untuk daerah perdesaan sebesar 0,29 poin dan 0,09 poin. Sementara daerah perkotaan penurunannya mencapai 0,26 poin dan 0,07 poin.

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Timur, Maret 2008- September 2011

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</i>			
Maret 2008	2,34	4,38	3,38
Maret 2009	2,18	3,54	2,88
Maret 2010	1,53	3,18	2,38
Maret 2011	1,51	2,96	2,27
September 2011	1,25	2,67	2,00
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</i>			
Maret 2008	0,61	1,23	0,93
Maret 2009	0,60	0,91	0,76
Maret 2010	0,37	0,79	0,59
Maret 2011	0,35	0,72	0,54
September 2011	0,28	0,63	0,46

Sumber: BPS, Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 s/d Maret 2011 dan September 2011

Untuk mereduksi: rumah tangga miskin di Jawa Timur, maka ditetapkan tiga strategi besar yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan yakni mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan kelembagaan. Pemerintah propinsi Jawa Timur menetapkan dua program prioritas penanggulangan kemiskinan yaitu :

- a) *Rescue* (penyelamatan) Kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan RTM seteah adanya kenaikan harga BBM melalul Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) oleh Pemerintah Propinsi (2006) dan Pada tahun 2007 menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES).
- b) *Recovery* (pemulihan) Upaya pengurangan kemiskinan jangka panjang, bersifat revolving, penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan bertujuan untuk pengetasan kemiskinan. Pemulihan ini melalui "Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GerduTaskin)".

GERDU-TASKIN

dilaksanakan mulai tahun 2002 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan TRIDAYA. Dengan upaya tersebut diharapkan terjadi penurunan angka kemiskinan; pengurangan jumlah pengangguran; peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM; pengurangan beban dan perbaikan

mutu hidup RTM, penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat miskin.

Pendanaan program GERDU TASKIN di danai oleh pemerintah provinsi dan kabupaten (sharing) dengan porsi 3/7 dari total dana. Sejak tahun 2002 s/d 2006 biaya melalui APBD Propinsi Jawa Timur sebesar Rp 200.599 miliar dan dana sharing APBD Kabupaten/kota sebesar Rp 63,305 miliar serta swadaya masyarakat sebesar Rp 20,648 miliar sedangkan dukungan dari dinas/instansi propinsi, dunia usaha dan BUMN/BUMD mencapai Rp 51,778 miliar. Disisi penguatan lembaga masyarakat miskin, sampai dengan tahun 2006 telah terbentuk Lembaga Keuangan Masyarakat sebanyak 1.410 unit pengeiola keuangan (UPK).

Tujuan umum Program Gerdu Taskin adalah untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan.serta memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencegah terjadinya kemiskinan baru serta dapat lebih berperan dalam pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Membantu keluarga miskin memperoleh kebutuhan pokok dengan cara yang terjangkau.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga sasaran, khususnya dalam bidang ekonomi yang

- mendukung upaya peningkatan kesejahteraan secara mandiri.
3. Mengembangkan kemampuan keluarga sasaran agar mempunyai mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.
 4. Meningkatkan akses keluarga miskin untuk mendapatkan modal, teknologi dan memiliki usaha yang tetap, serta akses untuk memperoleh fasilitas pembangunan dan pelayanan masyarakat lainnya.
 5. Menumbuhkan dinamika sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan secara gotong royong oleh masyarakat.
 6. Memperkuat kondisi dan keterpaduan di antara unsur-unsur yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat, dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Adapun sasaran dari pelaksanaan program Gardu Taskin adalah "keluarga miskin", yang terdiri dari kategori "keluarga Pra sejahtera" dan "Sejahtera 1" karena alasan ekonomi.

Kelompok Penerima Bantuan Modal Melalui Gerdu Taskin di Kabupaten Tuban

Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerdu Taskin / Gema Sejahtera (kelompok penerima Bansos/hibah) Triwulan II Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 160.000.000 bagi 14 kelompok. Rincian pemberian bantuan yaitu pada tahun 2005 sebanyak 3 kelompok, tahun 2006 sebanyak 4 kelompok, tahun 2008 sebanyak 3 kelompok, tahun 2009 sebanyak 1 kelompok, tahun 2010 sebanyak 1 kelompok dan 2011 sebanyak 2 kelompok.

Tabel 2.LKM Penerima Bantuan modal Melalui Gerdu Taskin di Kabupaten Tuban

No	Nama Kelompok	Th	Anggota	Alokasi Dana
1	Mardi Rahayu/Parengan-Sembung	2005	27	Rp. 10.000.000
2	Sumber Rejeki/Rengel-Pramboran Wtn	2005	49	Rp. 10.000.000
3	Kamboja/Widang Minoharjo	2005	0	Rp. 10.000.000
4	Flamboyan/Kerek-Minoharjo	2006	53	Rp. 10.000.000
5	Tenun/Kerek –Margorejo	2006	56	Rp. 10.000.000
6	Lestari/Kerek-Margorejo	2006	46	Rp. 10.000.000
7	Dahlia/Kerek-Margorejo	2006	47	Rp. 10.000.000
8	Langgeng/Rengel-Banjaranyum	2008	39	Rp. 10.000.000
9	Maju Sentosa/Rengel-Banjararum	2008	39	Rp. 10.000.000
10	Blimbing/Rengel –Banjararum	2008	41	Rp. 10.000.000
11	Mugi Lestari/Plumpang-	2009	29	Rp.

	Sumurjalak			15.000.000
12	Kamuning Indah/Jenu-Desa Jenu	2010	25	Rp. 15.000.000
13	Sejahtera/Ngadipuro- Widang	2011	28	Rp. 15.000.000
14	UPK Melati/Wanglu Kulon-Senori	2011	20	Rp. 15.000.000

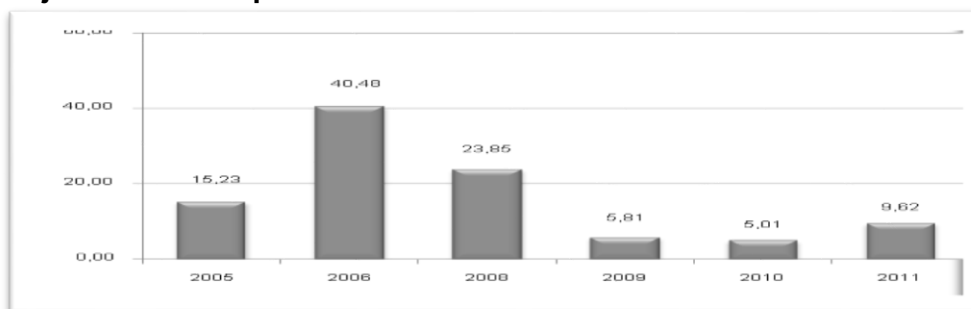
Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Tuban

Dari 14 (empatbelas) LKM yang mendapatkan bantuan Gerdutaskin/Gema Sejahtera melalui Dinas Koperasi dilakukan evaluasi kinerja terhadap 8 (delapan) kelompok yaitu terdiri dari Kelompok Masyarakat Flamboyan, Kelompok Mugi Lestari, Kelompok Tenun, Lestari, Sejahtera, Lestari, Blimbing, dan Kelompok Maju Sejahtera.

Seperti tampak pada grafik 2. ini menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun distribusi

pengalokasian pelaksanaan gerdu taskin / gema sejahtera di kabupaten Tuban berdasarkan volume pinjaman kepada seluruh anggota yang tercatat sejak tahun 2005 sampai tahun 2011 sebanyak 499 anggota yaitu tahun 2005 sebesar 12, 53%, tahun 2006 sebesar 40, 48%, tahun 2008 sebesar 23,85%, tahun 2009 sebesar 5,81%, tahun 2010 sebesar 5,01% dan tahun 2011 sebesar 9,62%.

Gambar2. Distribusi tahun penerimaan Bantuan Gerdu Taskin / GemaSejahtera di Kabupaten Tuban



Sumber: Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, data diolah

Dari 8 (delapan) kelompok LKM penerima bantuan melalui Gerdu Taskin ternyata ada yang lancar dan ada juga yang macet hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman modal yang digunakan karena gagal panen

dan ada juga yang dikarenakan digunakan untuk kebutuhan sehari hari untuk makan dan untuk biaya anak sekolah. Kelompok Blimbing yang terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban misalnya, semua anggotanya lancar mengangsur, demikian juga

Kelompok Tenun di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban..Kelompok lain yang memiliki anggota yang lancar dalam pengembalian dana bantuan modal adalah Kelompok Sejahtera Desa Ngadipuro Kecamatan Wedang, walaupun kelompok mereka tidak selalu tepat waktu dalam pengembalian angsuran namun diberikan perpanjangan waktu sampai mereka bisa mengembalikan, bahkan sampai musim panen berikutnya,

Sedangkan kelompok masyarakat yang lain rata-rata memiliki anggota yang relatif mengalami kemacetan dalam mengangsur, dan bahkan ada yang total macet, hal ini karena kebanyakan dari mereka mengalami kondisi ekonomi yang sulit sehingga

uang yang diberikan digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan anak sekolah ini berdasarkan hasil wawancara kami secara mendalam dengan responden.

Sumber informasi tentang Gerdu Taskin dari anggota kelompok mendapatkan Informasi tentang adanya bantuan dana melalui Gerdu Taskin adalah dari Staf Dinas yang membidangi Kelompok UKM (37,5%) dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM, namun demikian ada beberapa kelompok yang mendapatkan informasi dari UPK yang ada di lokasi mereka (37,5%), dan sisanya dari Staf Instansi Pemerintah-lainya yaitu Dinas Perekonomian dan Pariwisata yang mencapai sekitar 25%.

Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan Sumber informasi yang diperoleh Mengenai Program Gerdutaskin

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Prosentase
1	Staf Dinas yang membidangi Kelompok UKM	3	37,5
2	Staf Instansi Pemerintah-lainya (Dinas Perekonomian dan Pariwisata)	2	25
3	Pihak Lain (UPK Setempat)	3	37,5
Jumlah		8	100%

Sumber: Hasil Survey lapangan

Program Gardu taskin yang disalurkan melalui pemberian bantuan modal terhadap masyarakat di Kabupaten Tuban telah dilakukan dengan memberikan informasi terlebih dahulu terhadap calon penerima bantuan pada waktu itu, informasi tersebut telah diterima dan difahami oleh semua kempok penerima bantuan (100%) dari

Petugas Dinas Koperasi dan UMKM tentang Apa itu Gedu Taskin.

Dalam hal proses pengajuan dana bantuan Gerdu Taskin seperti persyaratan administrasi, penarikan dan pencairan dana, pengembalian dana, pelaporan, monitoring evaluasi diakui oleh hampir semua kelompok LKM bahwa mereka tidak merasa kesuilitan dalam pelaksanaannya,

beberapa dari mereka mengeluhkan tidak adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam hal pengembangan usaha mereka.

Penilaian tentang harapan atau saran tentang dukungan bantuan yang diperlukan untuk memajukan kelompok LKM, mereka rata-rata menyampaikan saran agar pemerintah memberikan bantuan pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta memberikan akses pasar terhadap usaha mereka, disamping itu ada juga yang berpendapat hendaknya bantuan tidak berupa uang melainkan barang bahan produksi atau peralatan misalnya pupuk, barang dagangan dan sebagainya.

Program Gerdu Taskin dan Gema Sejahtera Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro

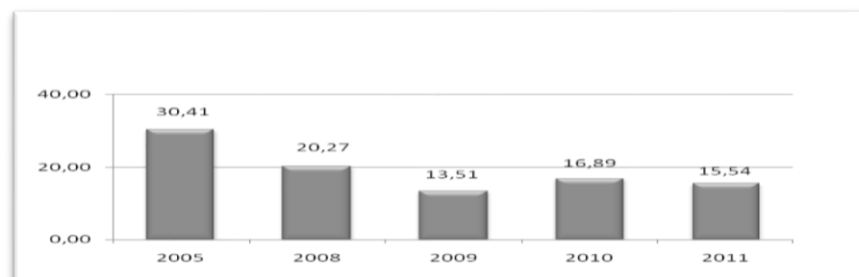
Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerdu Taskin / Gema Sejahtera Triwulan II Tahun 2011, Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 95.000.000 bagi 8 kelompok sejak dari tahun 2005 sampai tahun 2011 di Kabupaten Bojonegoro. Rincian pemberian bantuan antara lain pada tahun 2005 sebanyak 2 kelompok, tahun 2008 sebanyak 3 kelompok, tahun 2009 sebanyak 1 kelompok, tahun 2010 sebanyak 1 kelompok dan 2011 sebanyak 1 kelompok.

Tabel 4. Pengembalian Pinjaman dari penerima Bantuan Modal Gerdu Taskin di Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Kelompok	Th	Anggota	Jumlah Bantuan
1	Tani Widodo/Malo-Sukorejo	2005	20	Rp. 10.000.000
2	Melati/Sugiharas-Bareng	2005	15	Rp. 10.000.000
3	KUP Sari 01/Tambakrejo-Kacangan	2008	15	Rp. 10.000.000
4	KUP Sari 02/Tambakrejo-Kacangan	2008	15	Rp. 10.000.000
5	KUP Sari 03/Tambakrejo-Kacangan	2008	15	Rp. 10.000.000
6	UPK Tunas Gemilang/Temayang-Papringan	2009	20	Rp. 15.000.000
7	Subur Makmur/Baureno-Pucang Arum	2010	25	Rp. 15.000.000
8	UPK Sejahtera/Ngampal, Sumberrejo	2011	23	Rp. 15.000.000

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Bojonegoro

Gambar 3. Distribusi penerimaan Bantuan Gerdu Taskin / Gema Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro



Sumber: Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, data diolah

Pada gambar3 terlihat bahwa dalam kurun waktu 6 tahun distribusi pengalokasian pelaksanaan gerdu taskin / gema sejahtera di kabupaten Bojonegoro berdasarkan volume pinjaman kepada seluruh anggota yang tercatat sejak tahun 2005 - 2011 sebanyak 148 anggota yaitu tahun 2005 sebesar 30,41%, tahun 2008 sebesar 20,27%, tahun 2009 sebesar 13,51%, tahun 2010 sebesar 5,01% dan tahun 2011 sebesar 9,62%.

Dalam perkembangannya dari hasil evaluasi kinerja terhadap 6 kelompok responden menunjukkan LKM penerima bantuan melalui Gerdu Taskin di Kabupaten Bojonegoro ternyata ada yang lancar dan ada juga yang macet. Kebanyakan dari mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman modal karena sebagian dari anggota yang usahanya tani mengalami gagal panen dan ada juga yang dikarenakan digunakan untuk kebutuhan sehari hari untuk makan dan untuk biaya sekolah anaknya.

Dari 6 kelompok penerima bantuan dana melalui Gerdu Taskin yang lancar mengembalikan hanya ada 1 kelompok yaitu Kelompok Melati Putih, di Dusun Krakjan, Desa Bareng Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro, Kelompok yang memiliki anggota yang relative macet adalah kelompok Tunas Gemilang yang sampai saat ini telah memiliki 35 anggota dan yang macet

dalam pengembalian hanya ada 5 (lima) orang karena mengalami gagal panen. Demikian juga untuk Kelompok LKM relatif lancar dalam pengembalian dana bantuan modal adalah Kelompok UPK Sejahtera/ Ngampal, Sumberrejo walaupun tidak selalu tepat waktu dalam pengembalian angsuran namun diberikan perpanjangan waktu sampai mereka bisa mengembalikan, bahkan sampai musim panen berikutnya.

Jika dilihat dari sumber informasi darimana anggota kelompok mendapatkan Informasi tentang adanya bantuan dana melalui Gerdu Taskin adalah dari Staf Dinas yang membidangi Kelompok UKM (100%). Program Gardu Taskin yang disalurkan melalui pemberian bantuan modal terhadap masyarakat di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan dengan memberikan informasi terlebih dahulu terhadap calon penerima bantuan pada waktu itu, dan informasi tersebut telah diterima dan difahami oleh semua kelompok LKM penerima bantuan (100%) dari mereka mengakuinya telah menerima penjelasan dari Petugas Dinas Koperasi dan UMKM tentang Apa itu Gedu Taskin, Bagaimana memperoleh Gerdu Taskin, Mengapa ada Gerdu Taskin dan bahkan diajari atau mendapatkan pelatihan tentang manajemen keuangan dan Pembukuan, Pelaporan, monitoring dan evaluasi,

serta prosedur untuk mengakses dana Gerdu Taskin. Namun demikian sebagian dari mereka mengaku belum pernah menerima penjelasan tentang tambahan biaya pengurusan Gerdu Taskin.

Proses pengajuan dana bantuan Gerdu Taskin seperti persyaratan administrasi, penarikan dan pencairan dana, pengembalian dana, pelaporan, monitoring evaluasi telah diakui oleh hampir semua kelompok bahwa mereka tidak merasa kesulitan dalam pelaksanaannya, hanya saja beberapa dari mereka mengeluhkan tidak adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam hal pengembangan usaha mereka. Adapun harapan atau saran tentang dukungan bantuan yang diperlukan untuk memajukan LKM, mereka rata-rata menyampaikan saran agar pemerintah memberikan bantuan pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta memberikan akses pasar terhadap usaha mereka.

Anggota Penerima Program Gerdu Taskin dan Gema Sejahtera Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur (di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro)

Program bantuan dana melalui Gerdu Taskin/Gema Sejahtera di Kabupaten Tuban telah diberikan terhadap 14 (empatbelas) kelompok LKM yang menerima bantuan gerdu taskin, sedangkan dalam evaluasi ini telah dilakukan pengambilan sampel sebanyak 8 kelompok. Sedangkan Kabupaten

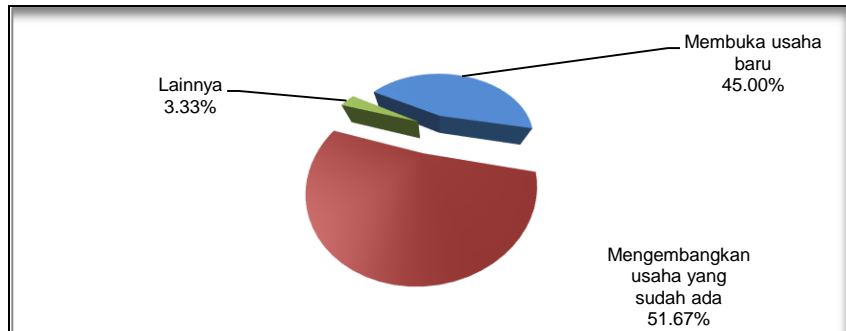
Bojonegoro dari 8 kelompok LKM yang menerima bantuan selama tahun 2005 sampai tahun 2011 dilakukan pada 6 kelompok.

Selanjutnya dari hasil survey ditemukan bahwa penerima pinjaman bantuan program gerdu taskin di kabupaten Tuban secara nominal adalah bervariasi jumlah uang yang diterimanya. Semua penerima program bantuan gerdu taskin adalah berupa uang dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000 untuk setiap anggota Usaha kecil dan Mikro binaan LKM penerima bantuan. Sedangkan Pinjaman barang/peralatan, hewan ternak maupun pinjaman bentuk lainnya tidak ada satupun anggota yang menerimanya.

Pinjaman berupa uang diharapkan akan membantu anggota kelompok yang menerima tersebut untuk digunakan membuka usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada misalnya digunakan sebagai modal usaha untuk jualan dengan menambah barang-barang yang akan dijualnya, digunakan untuk membeli bibit pertanian atau bibit ikan bilamana anggota ada yang memelihara ikan sebagai penopang tambahan hidup keluarga. Ada pula yang digunakan sebagai kebutuhan anggota untuk membeli pupuk, membeli peralatan usaha membuat wingko dan jajanan pasar lainnya serta masih ada kegunaan lain yang disampaikan anggota saat memberi penjelasan mengenai kegunaan daripada bantuan yang diterimanya, namun demikian dari mereka yang

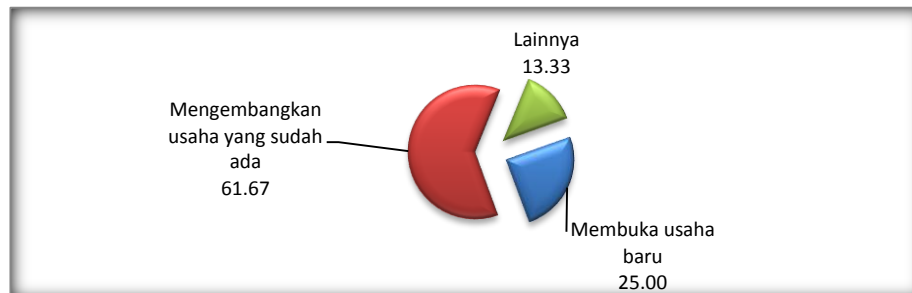
paling banyak adalah sebagai petani, dan peternak ayam, kambing ada juga yang ternak sapi.

Gambar 4. Kegunaan Bantuan Gerdu Taskin / Gema Sejahtera di Kabupaten Tuban



Sumber: data primer hasil survey, data diolah

Gambar 5. Kegunaan Bantuan Gerdu Taskin / Gema Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro



Sumber: data primer hasil survey, data diolah

Dalam gambar 4 ini menjelaskan bahwa dari 8 kelompok yang di survey di Kabupaten Tuban menyatakan bahwa bantuan gerdu taskin digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sebanyak 51,67%, untuk membuka usaha baru sebanyak 45%, sedangkan 3,33% digunakan untuk kegiatan lainnya. Sedangkan pada grafik 5 terlihat bahwa dari 6 kelompok LKM yang di survey di Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan bantuan gerdu taskin

digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sebanyak 61,67%, untuk membuka usaha baru sebanyak 25%, sedangkan 13,33% digunakan untuk kegiatan lainnya.

Bantuan yang telah diterima oleh kelompok-kelompok tersebut selanjutnya digulirkan pada UMKM atau petani anggota binaan masing-masing kelompok LKM. Pada umumnya kelompok LKM penerima bantuan hanya mengelola bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Berkait dengan

manfaat yang berhasil diperoleh anggota kelompok LKM penerima, untuk petani atau UMKM menyatakan bahwa sebagian besar belum mengalami kemajuan usaha setelah menerima dana tersebut. Penerima dana gerdu taskin di kabupaten Tuban, yang menyatakan belum ada perubahan kemajuan usaha dari hasil bantuan dana sebanyak 60% sedangkan 40% menyatakan bahwa bantuan usaha dapat memberi kemajuan pada kegiatan yang telah dilakukannya. Sedangkan di kabupaten Bojonegoro, yang menyatakan belum ada perubahan kemajuan usaha dari hasil bantuan dana sebanyak 68,33%.

Bantuan memberikan manfaat ini cukup berasal mengingat kondisi dan keadaan yang dialami masing-masing anggota kelompok sesuai karakteristik daerahnya. Untuk daerah yang tingkat kreatifitas SDM cukup baik akan memberi dampak atas bantuan yang diberikan. Salah satu contohnya adalah daerah sentra batik tuban di wilayah Margorejo kabupaten Tuban akan memberi alasan bahwa bantuan tersebut memberi cukup manfaat bagi anggotanya. Contoh kasus lain di daerah Temayang yaitu di UPK Tunas Gemilang kabupaten Bojonegoro mampu memberikan efek manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat setempat, dan bahkan tiap anggota mendapatkan bantuan hewan ternak berupa kambing secara cuma-cuma dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Sedangkan daerah yang tandus, dalam artian untuk menggarap tanah pertaniannya membutuhkan modal kerja yang cukup banyak maka hasil pertanian yang didanai dari bantuan tersebut belum memberi manfaat mengingat keuntungan yang diperoleh cukup dan bahkan belum mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga modal usaha untuk pertaniannya, digunakan untuk konsumsi sehingga untuk menggarap sawahnya kembali masih membutuhkan modal kerja yang diperoleh dengan meminjam atau gali lobang tutup lobang. Hal inilah yang memberikan jawaban belum dapat memperoleh adanya perubahan dalam kemajuan usahanya. Adapun kelompok yang menerima dana bantuan pada tahun 2011 atau kelompok terakhir ini umumnya dana belum dapat memberikan hasil yang nyata utamanya pada usaha yang baru dirintis mengingat masih baru mendapat bantuan usaha dari gerdu taskin ini.

Analisa SWOT Program Gerdu Taskin / Gema Sejahtera di Jawa Timur (Kabupaten Tuban dan Bojonegoro)

Selanjutnya berdasarkan pemahaman diatas dilakukan identifikasi keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) pada LKM penerima bantuan Gerdu Taskin/Gema Sejahtera di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro sebagai berikut:

Strenght (keunggulan)

LKM penerima bantuan secara

umum memiliki keunggulan komparatif sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM penerima bantuan beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam usaha;
- b) LKM penerima bantuan beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah;
- c) Sebagian besar Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM penerima bantuan dapat dikatakan padat karya (*labour intensive*).

Weakness (kelemahan)

- a) Permodalan
- b) Marjin Usaha yang cenderung tipis mengingat tingginya persaingan
- c) Kemitraan
- d) Sumber Daya Manusia yang masih rendah.baik aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan
- e) Struktur organisasi dan pembagian kerja / tugas kurang atau tidak jelas, bahkan sering mengarah pada *one man show*. Sulit mencari dan mempertahankan tenaga kerja atau pegawai yang memiliki loyalitas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab yang cukup tinggi
- f) Kemampuan manajerial

masih lemah, belum mampu memisahkan manajemen keuangan perusahaan dan rumah tangga. Belum mampu melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan tersusun.

Opportunity (Peluang)

- a) Adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat yang menunjang terciptanya pasar-pasar baru
- b) Dukungan pemodal usaha kecil yang gencardigalakkan pemerintah untuk mendorong usaha seperti KUR dan sebagainya
- c) Dukungan permodalan melalui berbagai program Gerdu Taskin.

Threat (Ancaman)

- a) Kurangnya kemampuan UKM binaan LKM penerima bantuan untuk meningkatkan akses pasar, daya saing, serta pemahaman regulasi pasar baik pasar domestik maupun pasar global
- b) UKM binaan LKM penerima bantuan belum mampu mempertahankan kualitas produk, jaringan pemasaran terbatas
- c) Promosi yang kurang efektif.

Dalam alternatif strategi dan implementasi yang merupakan gabungan antara faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor faktor eksternal (peluang dan ancaman), sehingga

terciptanya beberapa alternatif strategi program pengembangan LKM penerima bantuan dan peningkatan efektifitas program gerdu taskin / gema sejahtera di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Beberapa strategi alternatif yang bisa dilakukan berdasarkan analisis matrik SWOT tersebut sebagai berikut :

Strategi S – O

- a) Pengelompokan LKM penerima bantuan atas dasar klaster dengan berbagai kategori misalkan kategori padat sumberdaya alam (misal, produksi berbasis bahan baku yang dapat diperbaharui seperti pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan) maupun padat tenaga kerja (misal, produksi berbasis teknologi proses sederhana) menurut fase usahanya. dengan tetap, mengacu pada batasan geografis untuk memudahkan koordinasi.
- b) Pengelompokan bentuk pembinaan teknis dan berbasis kompetensi LKM penerima bantuan, misal LKM yang sudah berjalan diberikan kemampuan manajerial dan administrasi, pelatihan, dan konsultasi temporer; untuk usaha berjalan diberikan kemampuan manajerial dan administrasi, teknis, perdagangan dan konsultasi teknis permanen dan untuk LKM yang baru berjalan diberikan kemampuan

komunikasi interpersonal dan berasosiasi, manajerial dan administrasi, permagangan dan konsultasi teknis permanen. Pengelompokan ini dapat membantu peningkatan daya saing dan sekaligus daya tahan melalui pembentukan martsarantai nilai tambah yang melibatkan banyak pelaku usaha, baik dari usaha terhubung maupun berdekatan geografis.

- c) Peningkatan kemandirian LKM penerima bantuan melalui pembinaan dan penyuluhan.
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan pinjaman lunak.

Strategi W – O

- a) Peningkatan akses pemodaln bagi LKM potensial.
- b) Peningkatan kinerja, membenahi struktur LKM yang masih lemah.
- c) Pengembangan dan peningkatan kemitraan pada kegiatan Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM penerima bantuan dalam upaya menambah nilai tambah produksi.
- d) Pembinaan teknis dan berbasis kompetensi terhadap sumberdaya manusia LKM penerima bantuan menurut fase usahanya.

- e) Perlu dikembangkan dan dibakukan sistem penilaian yang mudah, cepat, andal, akurat dan dapat dipercaya dalam kerangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan LKM.

Strategi S – T

- a) Standarisasi harga untuk mengurangi persaingan antar Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM dalam sentra usaha
- b) Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM penerima bantuan yang saling menguatkan
- c) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur perekonomian pedesaan

- d) Memaksimalkan potensi promosi yang disediakan pemerintah.

Strategi W – T

- a) Membuka dan memperkuat jaringan pasar baru.
- b) Peningkatan produktivitas LKM penerima bantuan.
- c) Meningkatkan mutu produksi dengan menghasilkan produk yang maketable bagi UKM binaan LKM penerima bantuan.
- d) Memberikan kepastian jaminan usaha.
- e) Kualifikasi yang lebih ketat terhadap LKM penerima bantuan.
- f) Melakukan demplot lebih intensif tentang teknologi tepat guna.

Tabel 5. Tabulasi Matrik Analisis SWOT

		Kondisi Internal	
		Kekuatan (S - Strength)	Kelemahan (W - Weakness)
Kondisi Eksternal		1. LKM penerima bantuan beroperasi menyebar dengan berbagai ragam bidang usaha; 2. LKM penerima bantuan beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah; 3. Sebagian besar Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM penerima bantuan adalah padat karya (labour intensive)	1. Permodalan 2. Marjin Usaha yang cenderung tipis 3. Kemitraan 4. Sumberdaya Manusia. 5. Struktur organisasi dan pembagian kerja / tugas kurang atau tidak jelas, serta belum mampu melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan tersusun

	<p>Peluang (O-Opportunity)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat 2. Dukungan pemodal dari pemerintah 3. Dukungan bantuan pemodal melalui berbagai program Gerdu Taskin 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan LKM penerima bantuan atas dasar klaster dengan berbagai kategori misalkan kategori padat sumberdaya alam (misal, produksi berbasis bahan baku yang dapat diperbaharui seperti pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan) maupun padat tenaga kerja (misal, produksi berbasis teknologi proses sederhana) menurut fase usahanya. dengan tetap, mengacu pada batasan geografis untuk memudahkan koordinasi. 2. Pengelompokan bentuk pembinaan teknis dan berbasis kompetensi LKM penerima bantuan. 3. Peningkatan kemandirian LKM penerima bantuan melalui pembinaan dan penyuluhan. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan pinjaman lunak 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses pemodal bagi LKM potensial. 2. Peningkatan kinerja dan membenahi struktur LKM yang masih lemah, melalui penataan skala usaha, peningkatan kapasitas produksi. 3. Pengembangan dan peningkatan kemitraan pada kegiatan usaha LKM penerima bantuan dalam upaya menambah nilai tambah produksi. 4. Pembinaan teknis dan berbasis kompetensi terhadap sumberdaya manusia LKM penerima bantuan menurut fase usahanya. 5. Perlu dikembangkan dan dibakukan sistem penilaian yang mudah, cepat, andal, akurat dan dapat dipercaya dalam kerangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan UKM binaan, diantaranya kombinasi dari indikator pengembalian pinjaman kredit dan indikator kinerja usaha sebagai suatu fokus dan kegiatan evaluasi pembinaan.
	<p>Ancaman (T - Threat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan usaha. 2. Jaringan pemasaran Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM terbatas 3. Promosi yang kurang efektif. 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi harga untuk mengurangi persaingan antar Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM dalam sentra usaha 2. Pengembangan usaha kelompok LKM penerima bantuan yang saling menguatkan 3. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian LKM pedesaan 4. Memaksimalkan potensi promosi yang disediakan pemerintah. 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka dan memperkuat jaringan pasar baru. 2. Peningkatan produktivitas LKM penerima bantuan. 3. Meningkatkan mutu produksi dengan upaya menghasilkan produk yang maketable bagi Usaha Mikro dan Kecil binaan LKM penerima bantuan. 4. Memberikan kepastian jaminan usaha yang dilakukan LKM penerima bantuan. 5. Kualifikasi yang lebih ketat terhadap LKM penerima bantuan. 6. Melakukan demplot lebih intensif tentang teknologi tepat guna.

Sumber: hasil survey, data diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey terhadap LKM penerima bantuan dana melalui gerdu taskin/gema sejahtera di kabupaten Tuban dan Bojonegoro, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bantuan dana yang diterima LKM di Kabupaten Tuban telah digunakan oleh Usaha Mikro dan Kecil binaan mereka, dimana 40% menyatakan adanya kemajuan usaha setelah menerima dana gerdu taskin dari provinsi Jawa Timur sedangkan di Kabupaten Bojonegoro hanya 31,67% yang menyatakan ada kemajuan. Hal ini cukup beralasan mengingat karakteristik dan keadaan sosial ekonomi di masing masing wilayah berbeda.
- 2) Dana bantuan melalui program Gerdu Taskin telah dikembalikan oleh Usaha Mikro dan Kecil sebagai anggota binaan LKM baik di Kabupaten Tuban maupun Bojonegoro, namun ada juga yang macet tidak bisa mengembalikan, hal ini dikarenakan oleh petani yang gagal panen atau mereka yang mengalami kesulitan ekonomi keluarga sehingga uang digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya.
- 3) Kendala utama dalam pengembangan dana bantuan Gerdu Taskin / Gema Sejahtera adalah masalah sumber daya manusia, modal usaha yang diberikan, dan persepsi masyarakat tentang dana bantuan program Gerdu Taskin/ Gema Sejahtera.

SARAN

Untuk mengembangkan LKM dalam menunjang Usaha Mikro dan Kecil binaan yaitu dengan meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan program Gerdu/ Gema Sejahtera sekaligus mencegah terjadinya kemacetan dana bergulir di level pemanfaat dana ada beberapa strategi alternatif yang bisa dilakukan antara lain:

- a) Pengelompokan LKM penerima bantuan atas dasar klaster dengan berbagai kategori misalkan kategori padat sumberdaya alam (misal, produksi berbasis bahan baku yang dapat diperbaharui seperti pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan) maupun padat tenaga kerja (misal, produksi berbasis teknologi proses sederhana) menurut fase usahanya. dengan tetap mengacu pada batasan geografis untuk memudahkan koordinasi.
- b) Pengelompokan bentuk pembinaan teknis dan berbasis kompetensi LKM penerima bantuan, misal LKM yang sudah berjalan diberikan kemampuan manajerial dan administrasi, pelatihan, dan konsultasi temporer; untuk usaha berjalan diberikan kemampuan manajerial dan administrasi, teknis, perdagangan dan konsultasi teknis permanen dan untuk LKM yang baru berjalan diberikan kemampuan komunikasi interpersonal dan berasosiasi, manajerial dan administrasi,

permagangan dan konsultasi teknis permanen. Pengelompokan ini dapat membantu peningkatan daya saing dan sekaligus daya tahan melalui pembentukan matarantai nilai tambah yang melibatkan banyak pelaku usaha, baik dari usaha terhubung maupun berdekatan geografis.

- c) Peningkatan kemandirian LKM penerima bantuan melalui pembinaan dan penyuluhan.
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan pinjaman lunak
- e) Peningkatan akses pemodalán bagi LKM potensial.
- f) Pengembangan dan peningkatan kemitraan pada kegiatan usaha LKM penerima bantuan dalam upaya menambah nilai tambah produksi.
- g) Pembinaan teknis dan berbasis kompetensi terhadap sumberdaya manusia LKM penerima bantuan menurut fase usahanya.
- h) Perlu dikembangkan dan dibakukan sistem penilaian yang mudah, cepat, andal, akurat dan dapat dipercaya dalam kerangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan LKM, diantaranya kombinasi dari indikator pengembalian pinjaman kredit dan indikator kinerja usaha sebagai suatu fokus dan kegiatan evaluasi pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous.2004. Pedoman Umum Program Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan (GerduTaskin) Propinsi Jawa Timur Tahun 2004. Sektap Bapemas: Surabaya.

Arikunto, Suharsini. 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. UNDIP: Semarang

Hadi Prayitno dan Budi Santosa. 1999. Ekonomi Pembangunan. Ghalia Indonesia: Jakarta

Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, IViasaiah dan Kebijakan. Akuntansi Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta

Sartono Kartodirejo et. Al. 1996. Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan, Aditya Media: Yogyakarta.

Sayogyo. 1996, Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, Aditya Media: Yogyakarta.

Suhardi, Gunawan. 2003. Efektifitas GerduTaskin Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajangi.

Sugiyono. 2000. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfa Beta: Bandung.

Sumitro, Djojohadikusumo. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES: Jakarta.

Suyanto, Bagong. 1996.

- Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan. Aditya Media: Yogyakarta.
- Sudiyono, Arman. 1999. Pembangunan Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan. Program Studi Agribisnis UMM, Malang.
- Soekartawi. 1996. Pembangunan Pertanian Untuk Pengentasan Kemiskinan. UI Press. Jakarta.
- Soekartawi. 2002. Analisis Usaha Tani. Penerbit UI Press: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1999. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke-3 Terjemahan, Drs. Haris

Website:

- www.pacific.net.id/pakar/sadii/0799/140799.html
- www.cdsindonesia.org.
- www.rudyct.tripod.com/seml_023/hendriwan.htm.
- [www.ekonomi rakyat.org/edisi-22/artikel-6.htm](http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi-22/artikel-6.htm).
- [www.ekonomi rakyat.org/edisi_9/artikei-2.htm](http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi_9/artikei-2.htm).
- www.ekonomirakyat.org/edisi-1/artikel-5.htm.
- www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_2.htm.
- www.gatra.com/artikel.php?id=1454.
- www.bapemaskb.surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid
- www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/peran-lembaga-keuangan-mikro-dalam-pemberdayaan-umkm-di-indonesia
- www.elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/264756